

Abstrak

Peranan Retribusi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung

(Riska Ardilla, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peranan retribusi angkutan antar kota antar provinsi dalam menggali pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui sumbangan retribusi angkutan antar kota antar provinsi terhadap pendapatan daerah, sumbangan retribusi angkutan antar kota antar provinsi terhadap iuran sebulan, upaya dalam meningkatkan potensi daerah dan hambatan dalam retribusi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peranan retribusi angkutan antar kota antar provinsi dalam menggali pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung tidak terlalu besar. Meskipun peranannya kecil retribusi angkutan antar kota antar provinsi mampu menyumbangkan pendapatan daerah. Upaya pemerintah meningkatkan potensi daerah dengan menaikkan target setiap tahun dan masalah kurangnya partisipasi petugas retribusi serta wajib retribusi sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Kata kunci: *Angkutan, Pendapatan Daerah, Retribusi*

Abstract

The Role of Retribution of Inter-City And Inter-Province Bus In The Contribution To Own-Source Revenue of Bandar Lampung

(Riska Ardilla, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

The purpose of this study was to describe how the role of levies of inter-city transportation between provinces in exploring local revenue in Bandar Lampung City and to find out the contribution of inter-city transportation levies between provinces to regional revenue, the contribution of inter-city transportation levies between provinces on monthly dues, areas, and barriers in retribution. The method which was used was the descriptive method with the qualitative approach. Data collection techniques used observation, interview, and documentation techniques.

The results of this study indicated that in the role of levy of inter-city transportation between provinces in exploring revenue areas in the city of Bandar Lampung is not too large. Although the role of small levies of inter-city transportation between provinces can contribute to local revenue. Government efforts to increase the potential of the region by increasing the target each year and the problem of the lack of levy and retribution party retribution is very influential on the local revenue.

Keywords: Transportation, Local Revenue , Retribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasang surut sejarah perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan kemasyarakatan sejak awal kemerdekaan, selain menyumbangkan faktor-faktor penunjang bagi usaha pembangunan hukum nasional itu, juga mengandung faktor-faktor penghambat setidak-tidaknya melambangkan gerak pembangunan itu. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan ketetapan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab dituntut diterapkan manajemen pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sebagai manajemen yang mampu menyelesaikan tugas pekerjaan ke pemerintahan daerah secara cepat, berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami keborosan waktu maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan bahwa semua kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejarah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, cita desentralisasi tersebut senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintah negara, perwujudan cita-cita desentralisasi telah dilakukan langkah-langkah penting dalam perumusan

kebijakan politik sampai pada tingkat perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan. Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat yang tidak lepas dari nilai-nilai kultural dalam menghadapi dan memberi persepsi terhadap perkembangan penegak hukum, tuntunan pembangunan dan modernisasi tuntunan masyarakat akan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai keadilan sosial di semua bidang kehidupan nasional (kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan hankam) merupakan bagian terbesar dari isi proses pemikiran mengikuti perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan kemasyarakatan kita selama sekian tahun merdeka. Pertumbuhan kesadaran hukum yang bernilai positif dan konstruktif merupakan faktor penunjang baik dalam rangka pembinaan hukum. Kesungguhan kerja alat-alat penegak hukum, tingkat kewibawaan, kejujuran dan bersihnya aparatur pemerintah yang harus diperhitungkan dalam pembinaan hukum.

Ketentuan hukum yang berkenaan dengan pencegahan bahaya, kerugian dan gangguan bagi kehidupan bersama ini penting sekali dalam kaitannya dengan pembinaan kota, sebab mengetrapkan ketentuan-ketentuan tersebut tujuan pembinaan kota, yaitu terciptanya keadaan dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang sehat, aman, tenteram, indah dan bersusila dapat dicapai. Sebagai dasar bagi pembinaan kota, terutama pembinaan aspek non fisik termasuk tata pemerintahan kota adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan

beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikan otonomi daerah.

Mengingat kenyataan, perkembangan kota-kota Indonesia tidak sama pesatnya, ternyata ada beberapa kota mengalami perkembangan dengan pesat, walaupun perkembangan-perkembangannya kurang teratur dan terarah maka sudah sewajarnya apabila kota-kota di Indonesia dalam perkembangannya pada masa mendatang diatur dan diarahkan kiranya dapat dimengerti perlunya ada kegiatan-kegiatan pengarah dan pengaturan dengan melalui antara lain suatu perencanaan kota. Dalam rangka pembangunan daerah, sehingga perkembangan dan pembangunan kotanya teratur dan terarah.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*) desentralisasi pemerintah dan demokratisasi, namun diakui banyak upaya dan langkah perbaikan dan penguatan yang harus dilakukan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan peluang-peluang yang ada dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Salah satu aspek penting yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah manajemen keuangan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam melaksanakan

kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Pasal (19) “Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.” Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari berbagai kebijakan yang dihasilkan pemerintah kota, tampaknya telah terjadi kesalahan dalam memahami otonomi. realisasi pemungutan retribusi terminal dengan diberitakan masih banyak petugas yang tidak memberikan tiket pembayaran retribusi, bila tiket pembayaran retribusi tidak diberikan maka uang retribusi tidak tercatat dalam kas daerah dan kesalahan tersebut disebut pungli. cara membayarkan uang retribusi petugas tidak pernah memberikan karcis, ada beberapa wajib retribusi yang membayarkan uang tidak sesuai dengan tarif. Masalah pungutan liar lainnya masih banyak pegawai retribusi yang memungut uang retribusi lebih dari yang sudah ditentukan serta masih banyaknya Angkutan Umum/ Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) yang melakukan pemberhentian di depan Terminal. untuk membayarkan uang retribusi. Realisasi PAD untuk sektor parkir tahun ini masih sangat rendah hal ini disebabkan belum maksimalnya penggalan potensi yang ada di dinas ini, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Pemerintah Kota Bandar Lampung dari retribusi parkir belum mencapai target, salah satu penyebabnya diduga adanya juru parkir liar yang tidak menyetor pendapatannya. Peran serta partisipasi dalam masyarakat seringkali diabaikan.

Masalah Pemungutan Retribusi menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan bagi kota Bandar Lampung, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pembangunan daerah atau potensi daerah untuk menjamin tercapainya Anggaran Pendapatan Daerah untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan uraian diatas masalah ini sangat penting mengenai perkembangan kota Bandar Lampung. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Peranan Retribusi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teoritis

Deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variable yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

Pengertian Peranan

Menurut Soekanto (2006:212) "Peranan(Role) merupakan aspek dinamis kedudukan(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan." Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan. Peranan juga mempunyai dua arti setiap

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah : "Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa daerah otonom adalah: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Otonomi daerah adalah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Konsep pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penerapan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah. Dampak otonomi terhadap daerah yaitu menjadikan daerah memiliki peranan yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Menurut Sujatmo dalam Yunia sari (2015:9) menjelaskan bahwa “pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat Kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya”. Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, Menurut Kaho dalam Yunia sari (2015:9) ada beberapa faktor atau syarat yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Faktor manusia pelaksananya harus baik Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya yakni sesuai dengan

tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau pelaksananya harus pula baik.

2. Faktor keuangan Faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah besar uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.
3. Faktor peralatan yang cukup dan baik Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi. Apalagi dalam sebuah organisasi pemerintahan yang serba kompleks dan alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan.
4. Faktor organisasi dan manajemen Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik. Manajemen pemerintahan daerah yang baik tergantung pada kepala daerah beserta staffnya dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:96) “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

Created with

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- a. Hasil Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir.
3. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih Perusahaan Daerah baik bagi

Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.
6. Dana perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu :
7. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Selanjutnya bagi daerah yang sumber daya alamnya terbatas namun memiliki jumlah penduduk yang besar maka memperoleh DAK yang cukup besar demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain. Hak-hak tersebut tujuannya untuk meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari keuangan daerah yaitu untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka

penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

Retribusi Daerah

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001:283) Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut

- a. Untuk Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penerapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- b. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui Peranan Retribusi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung. Secara khusus untuk mendeskripsikan Sumbangan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan Retribusi Terhadap iuran sebulan, Upaya-upaya peningkatan potensi daerah dan Hambatan-hambatan dalam masalah retribusi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif akan memberikan gambaran tentang masalah melalui analisis dengan pendekatan ilmiah, metode ini dibutuhkan untuk menentukan data penelitian, menguji kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan serta mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.

Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan ialah dinas perhubungan sebagai informan kunci, peneliti

Created with

menggunakan teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Karakteristik sampel dari penelitian.

Setelah itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah dinas perhubungan dan dinas pendapatan daerah. Dalam unit tersebut menjadi sumber data utama yang dapat memberikan informasi. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah dinas perhubungan karena secara langsung yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kebutuhan masyarakat dalam hasil retribusi terminal sebagai sumber informan kunci yang paling utama. Teknik pengolahan data dipergunakan dengan cara menggali informasi dari dokumen yang telah dicatat dan analisis dilapangan langsung sesuai dengan masalah yang akan diteliti tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat situasi sosial tertentu sebagai obyek penelitian dengan Peranan Retribusi Angkutan Kota Antar Provinsi dalam pengamatannya di dinas perhubungan secara khusus dan pendukung pelaporan dari dinas pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) dengan yang bekerja di dinas pendapatan daerah dan dinas perhubungan kota bandar lampung. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang retribusi. Dari Peranan Retribusi Angkutan Kota Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung, Maka diperlukan. Jenis wawancara adalah wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Penelitian ini perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), caritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dalam hal ini sehubungan dengan Peranan Retribusi Angkutan Kota Antar Provinsi Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini diperlukan teknik pengolahan data yaitu:

1. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data dilapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (*validitas*) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.
2. Tabulating dan coding
Tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

Created with

mengelompokkan data-data serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel.

3. Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang ada.

Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian ini memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk fokus penelitian.

Proses penelitian ini dalam Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Langkah-langkah teknis analisis data menurut Miles dan Huberman (sugiyono,2015:91) dilakukan melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *Conclusion drawing(verification)*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing (verification)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, interaktif atau teori.

Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan data agar penelitian kualitatif yang diadakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif terdapat uji kredibilitas, ialah :

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian dokumentasi- dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca maka wawasan penelitian akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber

Created with

untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Pasal (19) “Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Fokus penelitian ini adalah melihat seberapa besar Peranan retribusi angkutan antar kota antar provinsi dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dengan beberapa sumbangan Retribusi Angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP) terhadap pendapatan asli daerah, sumbangan Retribusi Angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP) terhadap iuran sebulan, upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah dan hambatan-hambatan dalam masalah Retribusi.

Peneliti wawancara dengan delapan informan yang terdiri dari Petugas data retribusi dan petugas pemungut retribusi dengan kode PDR 1, PPR 1, PPR 2, PPR 3, PPR 4, dan informan bidang pelaporan dinas pendapatan dengan BPD 1, dan Kepala upt Terminal dengan KUT 1, dan informan bidang program dan informasi dengan BPI 1. Hasil analisis peneliti ialah wawancara mendalam dan pengamatan secara mendalam dengan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik ini disebut dengan triangulasi. Triangulasi digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan data yang didapat. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan teknik wawancara secara mendalam, kemudian observasi langsung untuk melihat pelaksanaannya serta didokumentasikan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Setelah itu peneliti

melakukan konfirmasi antara sumber dan teknik dalam penelitian.

Pada Penelitian peranan retribusi angkutan antar kota antar provinsi dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung ditemukan beberapa:

1) Sumbangan Retribusi Angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP) terhadap pendapatan asli daerah

Pajak Parkir 63,90%, Pelayanan persampahan 113,90%, Retribusi Parkir tepi jalan 65,25%, Retribusi pengujian kendaraan bermotor 34,22%, Retribusi kekayaan daerah 172,35% dan 152,50%, Retribusi Angkutan Antar kota antar Provinsi (AKAP) mencapai 30,80% dalam retribusi terminal 63,18%, dan Retribusi izin trayek 30,86%. Sumbangan retribusi terdapat 8 jenis retribusi yaitu pajak parkir, pelayanan persampahan, retribusi parkir ditepi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi izin trayek. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara kepada informan retribusi yang paling besar masuk di Kota Bandar Lampung ialah Pemakaian sewa kekayaan daerah.

2) Sumbangan Retribusi Angkutan antar kota antar Provinsi terhadap iuran sebulan

Sumbangan retribusi yang diteliti ialah retribusi terminal Rajabasa terkhusus yang masuk ialah mikrolet, mobil penumpang, bus kota, AKDP AC, AKDP EK, AKAP AC, AKAP EK, Non Bus. dengan melihat iuran sebulan rata-rata mencapai 1.926.534.271 dari penerimaan PAD. ditemukan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang cukup besar. Berdasarkan hasil

Created with

penelitian dari perbandingan Retribusi angkutan kota dan Retribusi lainnya, yang ditemukan retribusi pemakaian sewa daerah yang paling besar mencapai 324,85% dibandingkan retribusi terminal 63,18% dalam AKAP hanya 30,80% dari sumbangan retribusi yang masuk dari beberapa angkutan kota.

3) Upaya-Upaya Pemerintah dalam meningkatkan potensi daerah

Pemerintah daerah dalam tugasnya di Dinas perhubungan adalah Kepala Upt terminal sudah melakukan upaya dalam pengawasan dan pengendalian, Bidang program dan informasi secara keseluruhan sudah memberikan informasi rencana tata kerja dan Petugas pemungut Retribusi berupaya mengendalikan penerimaan Retribusi di setiap pos Retribusi. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan potensi daerah dengan pengendalian penerimaan retribusi, upaya yang dapat dilakukan peneliti menemukan beberapa upaya yaitu Pengawasan, pengendalian, memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama dalam meningkatkan penerimaan Retribusi.

4) Hambatan-hambatan dalam masalah Retribusi

Masalah dalam retribusi terminal ini ialah adanya pemerintah yang tidak memberikan karcis dan menurunnya realisasi pendapatan daerah masih banyaknya retribusi yang tidak tertib dalam Peraturan. Ditemukan dalam masalah ini ialah pada pemerintah dan wajib retribusi.

Keunikan hasil Penelitian

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.

Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Bagi yang menggunakan moda transportasi umum maka akan transit sebentar di terminal Rajabasa kota Bandar Lampung. Angkutan umum merupakan salah satu moda transportasi yang padat di Kota Bandar Lampung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan retribusi angkutan antar kota antar provinsi berdasarkan fokus masalah pada hasil penelitian ini

1. Sumbangan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah realisasi dari retribusi terhadap pendapatan daerah tahun 2015-2016 tidak meningkat .dari jenis-jenis Retribusi pajak parkir, pelayanan persampahan, retribusi parkir ditepi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi kekayaan daerah, retribusi terminal, dan retribusi izin trayek. Hasil dalam penelitian ini pemakaian sewa kekayaan daerah yang paling besar.
2. Sumbangan Retribusi terhadap iuran sebulan Dari besaran tarif dan jumlah kendaraan yang masuk ke terminal Rajabasa yaitu AKAP AC dan AKAP Ekonomi yang cukup besar secara khusus di terminal

Created with

Rajabasa, tetapi dibandingkan dengan jenis retribusi di kota bandar Lampung secara menyeluruh sumbangan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi memiliki peranan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah lainnya di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian di atas dari peranan Retribusi angkutan antar kota antar Provinsi dalam menggali pendapatan asli daerah memiliki peranan tidak terlalu besar bagi pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Meskipun peranannya kecil retribusi angkutan antar kota antar provinsi mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah untuk di wilayah kota Bandar Lampung. Dengan pemasukan yang meningkat tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan daerah. Jika realisasi mengalami penurunan dan tidak sesuai target yang diharapkan maka target yang dicapainya tidak terrealisasikan.

3. Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah Untuk mewujudkan hal tersebut ditemukan pemerintah memiliki upaya-upaya dalam meningkatkan potensi daerah yang ada yaitu:
 - a. Pengawasan Pemimpin kepada anggota organisasi telah dilakukan dalam kinerja pemerintah
 - b. Pengendalian dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat
 - c. Membuat kesepakatan bersama pada organisasi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi

4. Hambatan-hambatan dalam masalah Retribusi

Selain itu, peneliti juga menemukan hambatan-hambatan dalam masalah pemungutan retribusi yaitu :

1. Adanya Petugas Retribusi yang tidak memberikan karcis
2. Adanya bus yang tidak masuk ke terminal dan melakukan pemberhentian di luar terminal.
3. Wajib retribusi tidak mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan pemerintah daerah sehingga jalanan kota dimanfaatkan untuk pemberhentian.

Saran

1. Dinas Perhubungan sebaiknya memberikan sosialisasi kepada wajib retribusi dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Memberikan sanksi dengan pemberitahuan kepada wajib retribusi yang melakukan pemberhentian dipinggir jalan dapat mengganggu aktivitas kendaraan yang lain.
3. Partisipasi lebih di tingkatkan oleh pemerintah dan wajib Retribusi
4. Untuk masyarakat wajib retribusi harus lebih mengetahui tata tertib untuk kenyamanan, keselamatan dan keamanannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Solihin Dadang .2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Halim Abdul.2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Yunia Sari, Defi. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pemingutan Retribusi terminal*. (Studi kasus di terminal rajabasa) Skripsi

Peraturan daerah No. 06 Tahun 2011
Tentang Retribusi Kota Bandar Lampung

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah